



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI RIAU TAHUN 2019



Alamat:

Jalan. HR. Soebrantas Km. 10Pekanbaru

Telp. (0761) 62705 Fax.65839

Website: pmd.riau.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan pada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau tahun 2019 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2019 masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sementara metode penyusunan tetap menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau kepada Gubernur Riau dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

LKPJ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran program yang dilaksanakan selama tahun 2019 sesuai Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Tahun 2014-2019 serta Kebijakan dan realisasi program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau yang berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau, dan mengacu dari Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi, serta RKP.

Akhir kata, Semoga laporan LKPJ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019 ini dapat bermanfaat untuk rekomendasi pelaporan kinerja Kepala Daerah sebagai bahan untuk penyusunan LKPD Provinsi Riau.

Pekanbaru, Februari 2019

**Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU**



Hj. RAJA SITI NURAI SYAH, S.Sos. M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19671028 1995032001

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1Dasar Hukum.....	1
	1.2Tugas Pokok dan Fungsi	2
BAB II	SUMBER DAYA MANUSIA/ APARATUR SARANA PRASARANA DAN VISI MISI DINAS	5
	2.1. Sumber Daya Manusia/ Aparatur	5
	2.2. Sarana dan Prasarana.....	8
	2.3 Visi Misi Dinas PMD	9
	2.4 Tujuan dan sasaran	11
	2.5 Strategi	12
BAB III	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	13
	3.1. Program dan kegiatan Dana APBD.....	13
	3.2. Pelaksanaan Program dan kegiatan Dana APBD	16
BAB IV	REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PMD	55
	4.1. Realisasi dan Kendala Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD....	55
	4.2. Kendala.....	55
BAB V	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	55
	5.1. Permasalahan	56
	3.2. Solusi.....	56

LAMPIRAN :

1. Laporan Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan APBD 2019
2. Photo Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM

Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah setiap tahunnya berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Tahunan Kepala Daerah kepada DPRD. Untuk memenuhi maksud Undang – undang tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) melaporkan pelaksanaan program / kegiatan Tahunan untuk Tahun Anggaran 2019 sebagai bahan Laporan Tahunan Kepala Daerah. Dinas PMD memiliki tugas pokok, fungsi dan tata kerja yaitu sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Provinsi Riau adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan desa di Provinsi Riau secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemberdayaan Masyarakat pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, penguatan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat, serta pemberian perlindungan kepada masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat lemah.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Provinsi Riau dikelola oleh perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD).

Secara konsepsional, upaya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tugas hakiki pemerintah. Oleh karena itu, sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan didalam UU Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi seluruh upaya pemberdayaan masyarakat, serta

melibatkan seluruh stakeholders pembangunan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya pembangunan.

Keberadaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin menegaskan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau dalam upaya peningkatan kapasitas desa dan kelurahan. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 114 disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan meliputi :

- a. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;
- b. Melakukan pembinaan Kabupaten/ Kota dalam rangka pemberian Alokasi Dana Desa;
- c. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- d. Melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
- e. Melakukan pembinaan upaya Percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- f. Melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh desa;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
- i. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;
- j. Membantu pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa;
- k. Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar desa.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengakibatkan adanya tranformasi dalam pembentukan organisasi perangkat daerah salah satunya pada urusan wajib non pelayanan dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kebijakan ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Pasal 3 ayat 1 huruf d poin 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe A dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dinas PMD Provinsi Riau adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan desa di Provinsi Riau secara berdaya guna dan berhasil guna.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Sub Bagian serta 4 (empat) Bidang dengan 12 (dua belas) Seksi dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat

Terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, antara lain:

- 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
- 2) Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:

- 1) Seksi Peningkatan SDM Lembaga Kemasyarakatan;
- 2) Seksi Sosial Budaya Masyarakat dan Komunitas Adat;
- 3) Seksi Keswadayaan Masyarakat.

4) Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:

- 1) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, BPD dan Kelurahan;
- 2) Seksi Penataan dan Administrasi Desa dan Kelurahan;
- 3) Seksi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

5) Bidang Fasilitas Keuangan, Aset dan Pendampingan Desa

Terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:

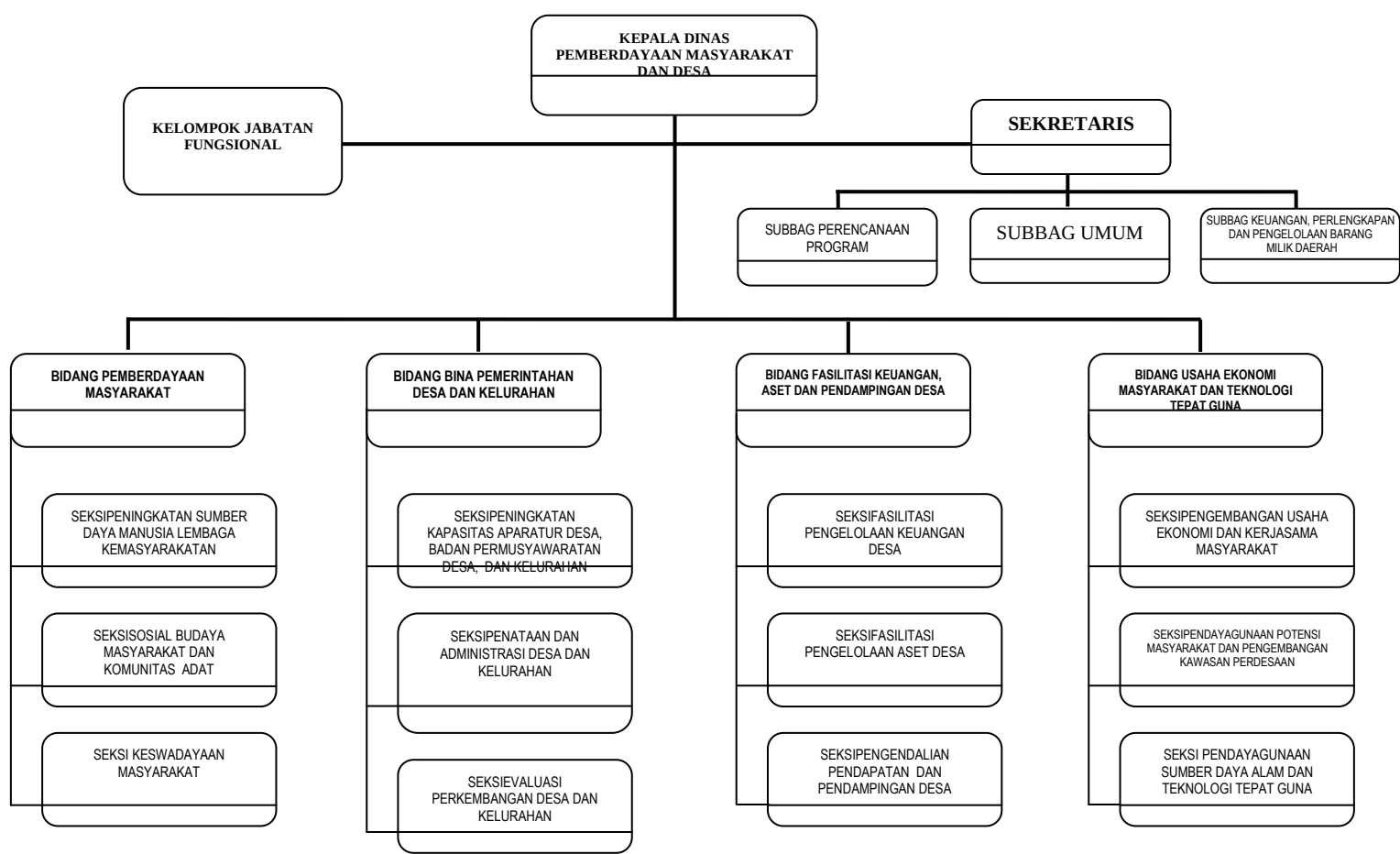
- 1) Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2) Seksi Fasilitas Pengelolaan Aset Desa;
- 3) Seksi Pengendalian Pendapatan dan Pendampingan Desa.

6. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan TTG

Terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:

- 1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Masyarakat;
- 2) Seksi Pendayagunaan Potensi Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
- 3) Seksi Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tepat Guna.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PROVINSI RIAU**



Gambar1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau

BAB II
SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA PRASARANA
DAN VISI MISI DINAS PMD

2.1.SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR

Sumber daya organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi faktor utama bagi setiap aktifitas organisasi sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan. Sumber daya yang ada dengan kata kunci daya/energi (*power*) yang artinya dapat diajukan dalam hal kemampuan, kekuatan, keberdayaan, peranan, kewenangan dan tanggung jawab. Sehingga sumber yang berarti sumber-sumber (*resources*) yang kaidahnya dalam manajemen dalam rangka pelaksanaan berbagai aktifitas untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Riau. Sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, didukung dengan 77 Orang Pegawai Negeri Sipil dengan komposisi per 31Desember 2019 sebagai berikut:

a. Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan Ruang:

NO	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	Golongan I	1	1,29
2	Golongan II	14	18,18
3	Golongan III	46	59,74
4	Golongan IV	16	20,77
	Jumlah	77	100

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas PMD sampai tgl 31 Desember2019.

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 46 orang (59,74%). Dan selanjutnya diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dengan golongan IVyang jumlahnya 16 orang (20,77%). Selanjutnya golongan II sebanyak 14 orang (18,18%) dan golongan 1 masih ada 1 orang (1,29%).

b. Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jabatan/Esselonering

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	12
4	Fungsional Perencana Pertama	2
5	Fungsional ArsiparisMadya	1
6	Fungsional ArsiparisMuda	1
7	Staf/ Fungsional Umum	53
	Jumlah	77

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas PMD sampai tgl 31 Desember 2019

Dari sejumlah 77 pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau, terdapat 1 orang dengan jabatan eselon II, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau; 5 orang dengan jabatan eselon III, yang terdiri dari Sekretaris dan 4 kepala Bidang, serta 12 jabatan eselon IV, 2 orang fungsional perencana pertama, 3 orang fungsional arsiparis dan yang lainnya sebanyak 53 adalah staf/fungsional umum. Hal ini sesuai dengan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau.

c. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Formal

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (2018)	JUMLAH (2019)
1	Strata 3 (S-3)	-	-
2	Strata 2 (S-2)	16	25
3	Strata 1 (S-1)	36	33
4	Diploma III	9	8
5	SLTA/SMK	16	10
6	SLTP	1	1
7	SD	1	0
	Jumlah	79	77

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas PMD sampai tgl 31 Desember 2019

Jika dilihat pada tingkat pendidikan selama 2 tahun terakhir, SDM Dinas PMD sangat bagus. Pendidikan S2 bertambah 9 orang dibandingkan tahun 2018. Tingkat SLTA berkurang dari tahun sebelumnya sebanyak 16 orang menjadi 10 orang. Dengan artian 6 orang sudah menempuh jenjang pendidikan S1. Secara tingkat pendidikan, kondisi pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau mencerminkan sumber daya aparatur yang sudah sangat baik, ini menandakan tingkat pendidikan sudah menjadi prioritas bagi ASN yang ada di PMD. Sehingga akan berpengaruh pada kinerja dan pencapaian tugas pada OPD.

d. Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan Penjenjangan

Selain dari tingkat pendidikan, kondisi kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prrovinci Riau dapat dilihat pada aspek pelatihan penjenjangan. Adapun klasifikasi jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan tercantum pada tabel 2.d berikut:

NO	NAMA PELATIHAN PENJEJANGAN	JUMLAH (2018)	JUMLAH (2019)
1	DIKLAT PIM IV	15	17
2	DIKLAT PIM III	10	13
3	DIKLAT PIM II	2	2
4	DIKLAT PIM I	0	0
5	DIKLAT FUNGSIONAL MADYA	1	1
6	DIKLAT FUNGSIONAL MUDA	1	2
7	DIKLAT FUNGSIONAL PERTAMA	2	1
	JUMLAH	31	36

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas PMD sampai tgl 31 Desember 2019

Pada Tabel di atas terlihat bahwa untuk pelatihan penjenjangan yang terbanyak telah diikuti adalah Diklatpim IV, yang telah diikuti 15 pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2018 dan menjadi 17 orang tahun 2019. kemudian Diklat PIM III sebanyak 10 orang atau sekitar 12,65% dari total pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Meningkat jadi 13 orang ditahun 2019. Yang telah mengikuti Diklatpim II sebanyak 2 orang atau sekitar 2,53%. Untuk pelatihan fungsional madya ada 1 orang, fungsional Muda 2 orang dan fungsional pertama 1 orang. Dari Total ASN 77 orang yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan baik itu structural maupun fungsional sebanyak 36 orang atau 46,75%

Adapun rincian dan klasifikasi jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional tercantum pada tabel berikut:

NO	NAMA DIKLAT YANG DI IKUTI	JUMLAH
1	Diklat Utama	0
2	Diklat Madya (Arsiparis)	1
3	Diklat Muda (Arsiparis)	1
4	Diklat Muda (Perencana)	1
	Diklat Pertama (Perencana)	1
	JUMLAH	4

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas PMD sampai tgl 31 Desember 2019

2.2. SARANA DAN PRASARANA.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh sarana dan prasarana kerja. Keadaan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Tahun 2019dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Pendukung SKPD

No.	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Tanah	8.250 m ²	
2	Mobil Dinas	11 Unit	
3	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	920 Unit	
4	Alat-Alat Studio dan Komunikasi	52 Unit	
5	Alat-Alat Keamanan	12 Unit	
6	Bangunan Gedung	9 Unit	
7	Bangunan Air	2 Unit	
8	Instalasi	1 Unit	
9	Jaringan	1 Unit	
10	Buku Perpustakaan	528 Buah	
11	Barang bercorak Kesenian	9 Unit	
12	Mobil Operasional	4 Unit	
13	Kendaraan dinas Sepeda Motor	1 Unit	

Sumber: Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Dinas PMD Tahun 2019

2.3. VISI MISI DINAS PMD PROVINSI RIAU

Visi sebagai gambaran tentang keadaan yang ingin diwujudkan pada masa yang akan datang sekaligus merupakan cita-cita dan keinginan bersama yang antisipatif, inovatif dan kreatif serta menjadi energi bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya sehingga dapat mendukung pencapaian serta pelaksanaan visi, misi dan program-program pembangunan pemerintah Provinsi Riau.

Untuk itu, seluruh jajaran dan unit kerja organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau perlu memiliki komitmen terhadap visi lembaga agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau dalam menjalankan urusan kewenangan pemerintahan serta menghadapi perubahan lingkungan internal maupun eksternal daerah, memiliki pandangan dan wawasan yang luas terhadap perkembangan permasalahan pembangunan secara lokal, regional maupun global.

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau disusun dengan memperhatikan VisiKepala Daerah, yang ditetapkan dalam Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 yaitu ***“Terwujudnya Provinsi Riau yang Maju, Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing Tinggi, Terhapusnya Kemiskinan serta tersedianya Lapangan Kerja”***.

Adapun Visi Dinas PMD Provinsi Riau adalah:

“Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan menuju Kemandirian Desa/Kelurahan”

Adapun penjelasan makna dari pernyataan Visi tersebut, adalah:

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi yaitu; *Pertama*, menciptakan suasana/iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. *Kedua*, memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat melalui langkah nyata menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya, penyediaan fasilitas, informasi, modal, lapangan kerja, pasar dan perdagangan infrastruktur yang memadai. *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi, mencegah lemah menjadi bertambah lemah.

MASYARAKAT; adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

DESA; adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MANDIRI; bermakna suatu sikap yang lebih menitikberatkan kepada kemampuan diri tanpa bergantung kepada orang lain.

Dari pernyataan visi tersebut akan diwujudkan melalui misi. Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Tahun 2014-2018 adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan, partisipasi masyarakat, tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat, pelestarian adat istiadat dan budaya lokal yang maju dan dinamis dalam pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
2. Meningkatkan efektifitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa serta pembinaan pendampingan desa;
4. Meningkatkan produktifitas Usaha Ekonomi Masyarakat Desa melalui pemanfaatan potensi masyarakat, Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.4. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2014-2019, sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan, partisipasi masyarakat, tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat, pelestarian adat istiadat dan budaya lokal yang maju dan dinamis dalam pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
2. Peningkatan efektifitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pelayanan publik;
3. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa serta pembinaan pendampingan desa;
4. Peningkatan produktifitas Usaha Ekonomi Masyarakat Desa melalui pemanfaatan Potensi Masyarakat, Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
5. Peningkatan dan pemantapan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sasaran merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam jangka waktu 5 tahun. Adapun sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan, partisipasi masyarakat, tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat, pelestarian adat istiadat dan budaya lokal yang maju dan dinamis dalam pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
2. Meningkatnya efektifitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pelayanan publik;
3. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa serta pembinaan pendampingan desa;
4. Meningkatnya produktifitas Usaha Ekonomi Masyarakat Desa melalui pemanfaatan Potensi Masyarakat, Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
5. Meningkatkan dan mantapnya kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.5. STRATEGI

Dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2014-2019, dilaksanakan melalui kebijakan strategik yang merupakan kebijakan prioritas dan diturunkan kedalam program-program strategik. Kebijakan strategik yang dirumuskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- a) Mendorong berperannya lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan untuk menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan masyarakat dalam proses pembangunan;
- b) Mendorong terwujudnya kehidupan sosial budaya masyarakat dan pelestarian adat yang maju dan dinamis;
- c) Mendorong terselenggaranya pemerintahan desa/ kelurahan yang tertib dan efektif agar pelayanan publik lebih optimal di pedesaan;
- d) Mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keluarga melalui pengembangan usaha ekonomi yang produktif;
- e) Mendorong terkelolanya potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi kelompok masyarakat;
- f) Mendorong terbentuknya kapasitas aparatur yang profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta terpenuhinya sarana prasarana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau.

BAB III
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN DANA APBD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan pada tahun 2019 terdiri dari 7 program dan 44 kegiatan yang terdiri dari:

Non Urusan :

- 1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran: Terdiri dari 12 Kegiatan
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur : 6 Kegiatan
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : 2 Kegiatan
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : 4 Kegiatan

Urusan Wajib :

- 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan : 8 Kegiatan
- 2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan : 2 Kegiatan
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa : 10 Kegiatan

Adapun rincian kegiatan per program Dinas PMD Provinsi Riau Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

**PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA INDIKATOR KINERJA DINAS PMD
PROVINSI RIAU TAHUN 2019**

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rentang waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor

5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan alat-alat listrik
8.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minum yang di sediakan
9.	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan SKPD	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan kehumasan
10.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rentang waktu Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
12.	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor	Rentang waktu Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara
17	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab
18	Penyediaan Sarana Kearsipan	Jumlah sarana kearsipan
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
19	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
20	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur senam dan pengajian
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
21	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumleh Dokumen Renja SKPD yang disusun
22	Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah pelaporan Keuangan, Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun
23	Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD	Jumlah Dokumen Renstra SKPD yang disusun
24	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil program/kegiatan
V.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	

25	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM) Tk. Provinsi	Jumlah kab/kota yang mengikuti bulan bakti gotong royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi Riau
26	Peningkatan Kapasitas Pengurus LPM	jumlah pengurus LPM yang mengikuti peningkatan kapasitas
27	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (PKK)	Jumlah pengurus yang dibina mengikuti peningkatan kapasitas
28	Pemasyarakatan dan Penguatan Kelembagaan PAMSIMAS	Jumlah Pengurus Pengelola BP SPAMS yang mengikuti penguatan kapasitas
29	Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Adat Melayu Se- Provinsi Riau	Jumlah Pengurus Lembaga Adat yang mengikuti Peningkatan Kapasitas
30	Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti kegiatan Gelar TTG
31	Peningkatan Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)	Jumlah kab/kota yang di bina dan mendapatkan peningkatan pelayanan unit pengaduan masyarakat (UPM)
32	Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Se- Provinsi Riau/ Pendamping Desa	Jumlah Kabupaten yang mendapatkan pembinaan administrasi pendampingan desa
VI.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	
33	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa se - Provinsi Riau	Jumlah Pengelola Pasar Desa yang mengikuti BIMTEK
34	Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan BUMDes se-Provinsi Riau	Jumlah Pengurus BUM Desa yang di Bina
VII	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
35	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa
36	Penyusunan Data Profil Desa/Kelurahan	Jumlah desa /kel yang di fasilitasi dalam rangka penguatan Profil desa dan kelurahan
37	Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah Pengurus BPD yg mengikuti Peningkatan Kapasitas dan terpilihnya BPD Terbaik tingkat Provinsi Riau
38	Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMDes dan RKPDes Bagi Aparatur Desa se- Provinsi Riau	Jumlah Aparatur Desa yang mendapatkan BIMTEK Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
39	Pembinaan Terhadap Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penataan Wilayah Desa	jumlah kabupaten/kota yang di fasilitasi dalam rangka penataan Desa/Keluahan
40	Rapat Kerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah peserta Rapat Kerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
41	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Provinsi Riau	Jumlah Peserta Aparatur desa yang mengikuti bimtek
42	Bimbingan Teknis Manajemen Aset Desa	Jumlah Peserta Aparatur desa yang mengikuti bimtek manajemen aset desa
43	Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa	Jumlah Laporan Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
44	Peningkatan Kapasitas Pendamping Profesional Desa Se- Provinsi Riau	Jumlah Pendamping Profesional Desa yang mengikuti Pelatihan

3.2. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DANA APBD

Pelaksanaan Program dan kegiatan Dana APBD 2019 Dinas PMD Provinsi Riau dapat dilaporkan sampai pada 31 Desember 2019.

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.) Penyediaan Jasa surat menyurat.

Terlaksananya administrasi yang baik merupakan capaian program yang diharapkan dari sebuah institusi atau kantor. Penyediaan Jasa surat menyurat ke beberapa instansi perlu dikirim dengan cepat dan tepat serta benda pos yang dipergunakan dalam menunjang kegiatan. Sehingga pelayanan administrasi kantor dapat meningkat serta administrasi perkantoran berjalan baik sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

- Pelaksanaan kegiatan : Pelayanan jasa surat penyurat kantor Dinas PMD
- Waktu kegiatan : Aktivitas kantor 12 bulan
- Tempat : Kantor Dinas PMD Provinsi Riau
- *Realisasi dan capaian kegiatan 100 %. Dan realisasi keuangan 90,9%*

2.) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kelancaran Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan rentang waktu penyediaan alat tulis kantor merupakan capaian program yang diharapkan di Dinas PMD Provinsi Riau. Sehingga outputnya menghasilkan tertib administrasi dan kelancaran administrasi di kantor. Hasil yang dicapai yakni tersedianya barang kantor yang berupa Alat Tulis Kantor disekretariat.

- Pelaksanaan kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Waktu kegiatan : Aktivitas kantor 12 bulan
- Tempat : Sekretariat kantor Dinas PMD
- *Realisasi dan capaian kegiatan 100%. Dan realisasi keuangan 99,96%*

3.) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kelancaran Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) merupakan capaian program yang diharapkan di Dinas PMD Provinsi Riau. Sehingga outputnya menghasilkan tertib administrasi dan kelancaran administrasi di kantor. Hasil

yang dicapai yakni tersedianya barang cetakan dan penggandaan barang dan dokumen-dokumen kantor disekretariat.

- Pelaksanaan kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen- dokumen kantor
- Waktu kegiatan : 12 bulan
- Tempat : Sekretariat kantor Dinas PMD Provisi Riau
- *Realisasi dan capaian kegiatan 100%. Dan realisasi keuangan 98,25%*

4.) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sebuah kantor harus refresentatif sehingga karyawan yang bekerja dapat nyaman dan lancer dalam mengerjakan tugas yang dilaksanakan. Penerangan bangunan sebuah kantor sangat diperlukan. Karena itu perlu penyediaan komponen instalasi listrik yang baik dan sesuai standar. Keluaran dan hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya instalasi listrik untuk keamanan dan penerangan kantor.

- Pelaksanaan kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor
- Waktu kegiatan : Aktivitas kantor 12 bulan
- Tempat : Sekretariat dan Bidang kantor Dinas PMD
- *Realisasi dan capaian kegiatan 100%. Dan realisasi keuangan99%*

5.) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Komponen bahan bacaan di sebuah kantor mesti ditingkatkan agar pemahaman aparatur ASN juga meningkat. Regulasi dan buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang menunjang tugas dan fungsi pegawai harus disediakan untuk bahan bacaan serta panduan dan menambah referensi pengetahuan sesuai pekerjaan dan tugas yang dikerjakan.

- Pelaksanaan kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Waktu kegiatan : 12 bulan
- Tempat : Kantor Dinas PMD Provisi Riau
- *Realisasi dan capaian kegiatan 75% Dan realisasi keuangan 61,53%*

6.) **Penyediaan Penyediaan Makanan Dan Minuman**

Persediaan pelayanan pada tamu-tamu yang datang untuk berkoordinasi dan berkonsultasi serta beberapa program kegiatan yang perlu pembahasan diperlukan penyediaan makanan dan minuman. Selain itu juga beberapa rapat-rapat lintas sektor serta rapat penunjang yang berhubungan dengan pembahasan program kegiatan.

- Pelaksanaan kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman
- Waktu kegiatan : 12 bulan
- Tempat : Kantor Dinas PMD Provisi Riau
- *Realisasi dan capaian kegiatan 100%. Dan realisasi keuangan 82,97%*

7.) **Penyediaan Jasa Layanan dan Keamanan Kantor**

Keamanan kantor perlu diperhatikan agar kenyamanan pegawai dalam bekerja dapat dilaksanakan. Tersedianya penjaga pengamanan kantor tentu sangat dibutuhkan baik pada layanan di siang hari dalam beraktivitas juga di malam hari menjaga keamanan sehingga sarana dan prasarana kantor dapat di lindungi dari hal-hal yang tidak di inginkan dan terjaganya inventaris yang ada di kantor.

- Pelaksanaan kegiatan : Penyediaan jasa layanan dan kemanan
- Waktu kegiatan : 12 bulan
- Tempat : 3 gedung, 1 Aula dan 1 Musholla
Kantor Dinas PMD Provisi Riau
- *Realisasi dan capaian kegiatan 100%. Dan realisasi keuangan 96,52%*

8.) **Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah**

Dalam menjalankan tugas sehari-hari dan untuk memperlancar Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau perlu dianggarkan biaya untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi baik dalam daerah maupun luar daerah. Sehingga semua pegawai dapat mewujudkan kinerja yang baik dan lancar sesuai tugas yang di emban dan diperintahkan atasan dalam menjalankan program dan kegiatan di sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau.

- Pelaksanaan kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah

- Waktu kegiatan : 12 bulan
- Tempat : Dalam daerah dan luar daerah Prov Riau
Kantor Dinas PMD Provisi Riau
- *Realisasi dan capaian kegiatan 100%. Dan realisasi keuangan 99,73%*

9.) **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik**

Kelancaran tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau lainnya adalah meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yaitu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik. Terlaksananya pembayaran sarana listrik, sumber daya air dan komunikasi telpon serta internet merupakan kebutuhan pembiayaan rutinitas kantor.

- Pelaksanaan kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Pembayaran Sarana komunikasi 5 saluran telpon, sarana listrik 33.000 Kwh.
- Waktu kegiatan : 12 bulan
- Tempat : Kantor Dinas PMD Provisi Riau
- *Realisasi dan capaian kegiatan 100%. Dan realisasi keuangan 74,37%*

10.) **Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD**

Capaian program yang diharapkan adalah Terwujudnya jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov.Riau, Meningkatnya pelayanan Informasi untuk kabupaten/kota pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik di sekretariat dan bidang dapat di himpun dan di publikasikan sehingga masyarakat dapat mengetahui.

- Pelaksanaan kegiatan : Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dankehumasan SKPD.
 - Pengadaan spanduk himbauan Gubernur Riau tentang penggunaan Dana Desa
 - Memuat berita kegiatan di media media online lainnya yang telah diselenggarakan baik di sekretariat ataupun bidang.
 - Menerbitkan buletin Minda Riau yang memuat pembangunan desa-desa di Riau. Bulletin disebarkan ke seluruh kabupaten di Riau.

- Waktu kegiatan : 12 bulan
- Tempat : Kantor Dinas PMD Provisi Riau dan lokasi acara kegiatanyang diselenggarakan.
- *Realisasi dan capaian kegiatan 100%. Dan realisasi keuangan 96,57%*

11.) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Capaian program yang diharapkan adalah Terselenggaranya pelayanan dan kelancaran dalam menunjang kegiatan operasional kendaraan pegawai terutama kendaraan dinas pejabat eselon 2 dan eselon 3 serta mobil dinas operasional kantor lainnya. Terlaksananya pemeliharaan dan tertib perizinan kendaraan dinas dapat menunjang kinerja pegawai sehingga tugas yang diemban dan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar.

- Pelaksanaan kegiatan : Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas dan kendaraan Operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas dan kendaraan operasional. Memperpanjang perizinan mobil operasional, penggantian suku cadang dan belanja bahan bakar.
- Waktu kegiatan : 12 bulan
- Tempat : Kantor Dinas PMD Provisi Riau
- *Realisasi dan capaian kegiatan 100%. Dan realisasi keuangan 73,61%*

12.) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Capaian program yang diharapkan adalah Terwujudnya kebersihan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau. Kebersihan kantor sangat diperlukan sehingga pegawai yang bekerja merasa nyaman. Penyediaan jasa kebersihan kantor tidak bisa diabaikan. Petugas betul-betul dapat melaksanakan pekerjaanya sesuai jam yang telah ditentukan.

- Pelaksanaan kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya petugas yang membersihkan kantor yaitu: 3 gedung, 1 aula dan 1 musholla serta halaman kantor dan pekarangan parkir kendaraan, belanja peralatan kebersihan, jasa tukang kebun
- Waktu kegiatan : 12 bulan

- Tempat : Kantor Dinas PMD Provisi Riau
- *Realisasi dan capaian kegiatan 100%. Dan realisasi keuangan 99,23%*

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

13.) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Capaian program yang adalah Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan perkantoran serta pelaksanaan pemeliharaan gedung sebanyak 5 gedung kantor. Dengan pemeliharaan rutin dan berkala, gedung akan terawat serta pegawai yang bekerja dapat nyaman dalam mengerjakan tugas sehari-hari. Dengan perawatan yang kontiniu umur sebuah bangunan akan bertahan lama.

- Pelaksanaan kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan kantor
- Waktu kegiatan : 12 bulan
- Tempat : Kantor Dinas PMD Provisi Riau
- *Realisasi dan capaian kegiatan 100 %. Dan realisasi keuangan 98,10%*

14.) Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Kantor

Peralatan kantor perlu pemeliharaan dan perawatan rutin secara berkala agar peralatan yang di pakaai akan bertahan lama dan tidak mudah rusak. Sarana dan prasarana adalah hal yang penting diperhatikan dan dianggarkan sehingga kinerja pegawai tidak terganggu dalam melaksnakan tugas.

- Pelaksanaan kegiatan : Pemeliharaan Rutin/peralatan Kantor
Terlaksananya pemeliharaan dan jasa servis peralatan kantor serta perbaikan peralatan kantor.
- Waktu kegiatan : 12 bulan
- Tempat : Kantor Dinas PMD Provisi Riau
- *Realisasi dan capaian kegiatan 100%. Dan realisasi keuangan 99,56%*

15.) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Capaian program ini adalah terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor. Dengan capaian ini kelancaran kegiatan rutinitas dapat tercapai dan meningkatkan kinerja pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau. Meningkatnya Produkifitas dan kenyamanan kerja

pada unit kerja sangat diperlukan sehingga pengadaan perlengkapan diperlukan

- Pelaksanaan kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan, pengadaan Almari, Filling cabinet, penyekat ruangan, meubilier, karpet, televise, sound sistem serta beberapa ruang kantor serta pengadaan lainnya.
- Waktu kegiatan : 12 bulan
- Tempat : Kantor Dinas PMD Provisi Riau
- Realisasi dan capaian kegiatan **100 %**. Dan realisasi keuangan **97,58%**

16.) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Capaian program ini adalah tersedianya peralatan gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau. Dengan tercapainya program ini akan meningkatkan kinerja pegawai dalam menjalankan rutinitas kerja sehari-hari. Pengadaan peralatan dan moubiler sangat diperlukan bagi sebuah kantor sehingga pekerjaan akan semakin lancar .

- Pelaksanaan kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan antara lain: belanja AC, mesin potong rumput, pengadaan computer, lapotop, printer, UPS/ stabilizer, kulkas, drone, proyektor. Dan lainnya yang mendukung kinerja pegawai dalam pekerjaan sehari-hari
- Waktu kegiatan : 12 bulan
- Tempat : Kantor Dinas PMD Provisi Riau
- Realisasi dan capaian kegiatan **100 %**. Dan realisasi keuangan **97,97%**

17.) Rehabilitasi sedang/ Berat Gedung Kantor

Capaian program ini adalah terselenggaranya rehab gedung kantor serta konsultansi perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau. Dengan tercapainya program kegiatan ini akan meningkatkan kualitas

sebuah gedung serta mempercantik ruangan sesuai kebutuhan dan kondisi ruangan yang ditemmapi pegawai.

- Pelaksanaan kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
Terlaksananya rehab ruang subbag perencanaan, ruang kearsipan.Pengecatan gedung utama, pemasangan pavingblock serta pembuatan Detail Enginering Design.
- Waktu kegiatan : 1 Tahun
- Tempat : Kantor Dinas PMD Provisi Riau
- Realisasi dan capaian kegiatan **100 %**. Dan realisasi keuangan **98,08 %**

18.) Penyediaan sarana kearsipan

Capaian program ini adalah tersedianya jumlah sarana kearsipan lebih kurang 11 unit pada kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau. Dengan tercapainya program ini akan meningkatkan kinerja pegawai khususnya berkaitan dengan penataan arsip dan dokumen dalam menjalankan rutinitas kerja sehari-hari.

- Pelaksanaan kegiatan : Penyediaan sarana dan prasarana kearsipan.
Terlaksananya penyediaan sarana kearsipan untuk mendukung penataan dokumen yang ada di dinas PMD. Belanja Alat Tulis Kantor, penggandaan dan cetak.
- Waktu kegiatan : 12 bulan
- Tempat : Kantor Dinas PMD Provisi Riau
- Realisasi dan capaian kegiatan **100 %**. Dan realisasi keuangan **98,16 %**

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

19.) Pendidikan dan pelatihan Formal

Capaian program ini adalah jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. menambah wawasan dan pengetahuan Pegawai Negeri Sipil berupa terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan sosialisasi aparatur ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau. Dengan tercapainya program ini akan semakin

meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan kinerja pegawai dalam menjalankan tupoksinya.

- Pelaksanaan kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal.
Terlaksananya kegiatan Bimtek, Diklat dan sosialisasi yang dapat meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau.
- Waktu kegiatan : 12 bulan
- Tempat : Kantor Dinas PMD Provisi Riau dan tempat pelaksanaanDiklat dan Bimtek serta sosialisasi
- Realisasi dan capaian kegiatan **100%**. Dan realisasi keuangan **64,15%**

20.) Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

Capaian program ini adalah jumlah ASN yang mengikuti pembinaan fisik dan mental, menambah wawasan dan pengetahuan Pegawai Negeri Sipil berupa terlaksananya kegiatan pembinaan mental dan kebugaran fisik dibidang ke olahragaan dan keagamaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau.

- Pelaksanaan kegiatan : Pembinaan mental dan fisik Aparatur.
Terlaksananya kegiatan pembinaan fisik berupa keolahragaan untuk kesehatan pegawai dan pembinaan keagamaan berupa pengajian ceramah agama untuk semua aparatur ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau.
- Waktu kegiatan : 12 bulan
- Tempat : Kantor Dinas PMD Provisi Riau
- Realisasi dan capaian kegiatan **100%**. Dan realisasi keuangan **100%**

**IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan**

21.) Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Capaian program ini adalah Diperolehnya dokumen perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja SKPD yang mendukung kelancaran program dan kegiatan baik disisi perencanaan dan penganggaran yang dijadikan pedoman untuk pelaksanaan ditahun yang akan datang.

❖ Pelaksanaan kegiatan: Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Terlaksananya kegiatan penyusunan rencana kerja SKPD, belanja makan minum rapat penyusunan Renja, pencetakan dan penggandaan.

- Waktu kegiatan : 12 Bulan
- Tempat : Kantor Dinas PMD Provisi Riau
- Realisasi dan capaian kegiatan **100%. Dan realisasi keuangan 88,35%**

22.) Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun

Capaian program ini adalah Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan yang mencakup triwulan, semesteran dan akhir tahun pada Dinas PMD Provinsi Riau.

❖ Pelaksanaan kegiatan: Penyusunan Pelaporan Keuangan yang mencakup triwulan, semesteran dan akhir tahun

Terlaksananya kegiatan penyusunan Jumlah pelaporan Keuangan, Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun, belanja makan minum penyusunan laporan, pencetakan dan penggandaan.

- Waktu kegiatan : 12 Bulan
- Tempat : Kantor Dinas PMD Provisi Riau
- Realisasi dan capaian kegiatan **100 % . Dan realisasi keuangan 98,62 %**

23.) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)SKPD

Capaian program ini adalah Diperolehnya dokumen perencanaan dan penyusunan Rencana strategis SKPD Terlaksananya Penyusunan revisi renstra serta Pelaporan dan penggandaan laporan revisi renstra yang mendukung kelancaran program dan kegiatan baik disisi perencanaan dan penganggaran yangdijadikan pedoman untuk pelaksanaan 1 kepala daerah.

❖ Pelaksanaan kegiatan: Penyusunan Rencana Strategis (Rentra) SKPD.

Terlaksananya Penyusunan rencana strategis (renstra) serta Pelaporan dan penggandaan laporan, revisi renstra, belanja makan minum rapat penyusunan.

- Waktu kegiatan : 12 Bulan
- Tempat : Kantor Dinas PMD Provisi Riau

Realisasi dan capaian kegiatan 100 %. Dan realisasi keuangan 88,32 %

24.) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD

Capaian program ini adalah Diperolehnya Data yang akurat terhadap Pelaksanaan dan Hasil Program Kegiatan yang sudah dijalankan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perovinsi Riau. Dengan kegiatan ini tercapai monitoring dan evaluasi sehingga kelemahan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diperbaiki dimasa yang akan datang dengan perencanaan yang baik dan tepat sasaran.

- Pelaksanaan kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD.
 - ✓ Terlaksanya monitoring dan evaluasi program kegiatan yang mendukung penyusunan rencana strategis periode 2019-2024.
- Dalam monev ini diselenggarakan secara terpadu antara Dinas PMD, Bappeda serta Perguruan Tinggi dari UNRI. Jadwalnya antara bulan Agustus sampai dengan bulan Nopember 2019. Dengan pengambilan sampel 20 desa di 10 kabupaten di Provinsi Riau. Adapun variable

yang dimonev antara lain: mengetahui aspek
penyelarasan program kegiatan dari desa ke
kabupaten

- Waktu kegiatan : 1 tahun di 12 kabupaten/ kota
- Tempat : Desa-desa di 12 kabupaten/ kota se Provinsi Riau
- Realisasi dan capaian kegiatan **100 %**. Dan realisasi keuangan **75,61 %**

V. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

25.) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (PKK)

Capaian program ini adalah meningkatnya peran Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam memberdayakan masyarakat Provinsi Riau, menyamakan persepsi dan mengimplementasikan visi dan misi serta untuk mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan 10 program pokok PKK yang bertujuan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tim penggerak PKK, meningkatnya pengetahuan serta kapasitas pengurus PKK, terlaksannya rapat konsultasi dan jambore kader PKK se Provinsi.

- **Rangkaian Pelaksanaan kegiatan (1):**
 - ✓ Terlaksananya Acara Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi Riau Tahun 2019, mengundang Narasumber dari TP PKK Pusatserta materi dari Pokja Tim Penggerak PKK Provinsi Riau
 - ✓ Peserta Kegiatan Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi Riau diikuti oleh TP PKK 12 Kab/Kota Se- Provinsi Riau sebanyak 140 orang,
- Tujuan Kegiatan:
 - ✓ Untuk mensosialisasikan hasil Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK Tingkat Nasional.
 - ✓ Sebagai ajang koordinasi antar anggota Tim Penggerak PKK guna menyerap aspirasi dan masukan dari peserta Rapat Konsultasi TP-PKK se-Provinsi Riau Tahun 2019.
 - ✓ Untuk mewujudkan kader PKK yang profesional dalam mensukseskan 10 program pokok PKK.
 - ✓ Untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan kader PKK.

- ✓ Untuk meningkatkan motivasi dan kinerja kader PKK dalam menunjang terwujudnya keluarga yang sehat sejahtera.
- ✓ Terwujudnya keseragaman pelaksanaan program kerja Tim Penggerak PKK disetiap jenjang kepengurusan di Provinsi Riau.
- Waktu kegiatan/ tempat:
 - ✓ Kegiatan Rapat Konsultasi Daerah Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi Riau dilaksanakan di Hotel Alpha Pekanbaru, tanggal 9 s/d 10 September 2019.
- **Rangkaian Pelaksanaan kegiatan (2):**
 - ✓ Terlaksananya Acara Pelaksanaan Jambore Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi Riau
 - ✓ Dalam rangka memantapkan pelaksanaan gerakan PKK melalui 10 program PKK, program unggulan, program prioritas serta program inovasi Tim Penggerak PKK untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kader PKK dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat juga menyaring kader PKK yang berprestasi
 - ✓ Peserta Kegiatan Jambore Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi Riau diikuti oleh TP PKK 12 Kab/Kota Se- Provinsi Riau sebanyak 250 orang.
- Tujuan Kegiatan:
 - ✓ Untuk mewujudkan kader PKK yang profesional dalam mensukseskan 10 program pokok PKK.
 - ✓ Untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan kader PKK.
 - ✓ Memberikan penghargaan kepada para kader PKK atas prestasinya terhadap Pelaksanaan gerakan PKK
 - ✓ Untuk meningkatkan motivasi dan kinerja kader PKK dalam menunjang terwujudnya keluarga yang sehat sejahtera
- Waktu kegiatan/ tempat:
 - ✓ Kegiatan Jambore Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi Riau dilaksanakan dan seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan tanggal 11 September 2018 di Gedung Wanita Pekanbaru.

- **Rangkaian Pelaksanaan kegiatan (3)** :
- ✓ Terlaksananya Acara Pelaksanaan Penilaian Lomba Dalam Rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tingkat Provinsi Riau
 - ✓ Dalam rangka memantapkan rasa kepercayaan, kesadaran, pembinaan dan kerjasama dengan mitra sektor dunia usaha. Pembinaan melalui lomba-lomba kegiatan dalam rangka acara puncak HKG PKK.
- Tujuan Kegiatan:
- ✓ Meningkatnya kualitas dan kuantitas Kelompok Dasawisma
 - ✓ Memantapkan peran kelembagaan dan 10 Program Pokok PKK dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan keluarga
 - ✓ Terlaksananya administrasi PKK secara teratur, tertib dan terarah untuk mendukung pencapaian tujuan
 - ✓ Menurunnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
 - ✓ Berkembangnya usaha-usaha Keluarga melalui Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK
 - ✓ Meningkatnya kesadaran masrakata untuk memanfaatkan lahan sebagai lumbung hidup, warung hidup, tanaman obat keluarga, peternakan, dan perikanan bagi keluarga dalam mewujudkan keyahanan pangan keluarga
 - ✓ Meningkatnya derajat kesehatan perempuan melalui program pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan (kanker leher rahim dan kanker payudara)
 - ✓ Memberikan penghargaan kepada para Kader dan Tim Penggerak PKK yg berprestasi dlm pelaksanaan program- PKK
- Waktu kegiatan/ tempat:
- ✓ Peserta penilaian lomba yaitu 12 kabupaten/ kota se Provinsi Riau. Dimulai 1 Agustus s/d 5 September 2019.
- Sasaran lomba:
- ✓ Administrasi PKK, sasarannya Sekretariat TP PKK berjenjang dari desa atau kelurahan, kecamatan sampai dengan kabupaten/kota
 - ✓ Pola Asuh Anak dan Remaja dengan Penuh Cinta dan Kasih Sayang dalam Keluarga, sasarannya kelompok PKK dan keluarga yang ada di RT/RW, desa atau kelurahan
 - ✓ Kelompok UP2K-PKK sasarannya kelompok UP2K PKK/perorangan di desa atau kelurahan
 - ✓ Pemanfaatan halaman pekarangan rumah/HATINYA PKK sasarannya adalah keluarga yang memanfaatkan halaman pekarangan rumahnya di desa atau kelurahan tersebut

- ✓ Pelaksanaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) test dalam rangka pencegahan kanker mulut Rahim, sasarannya tenaga kesehatan, kelompok PKK, dan perorangan di desa atau kelurahan

➤ *Realisasi dan capaian kegiatan 100%. Dan realisasi keuangan 79,91%*

26.) **Pemasyarakatan dan Penguatan Kelembagaan PAMSIMAS**

➤ Pelaksanaan kegiatan :

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) merupakan salah satu program andalan Nasional (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Program Pamasimas III dilaksanakan untuk mendukung dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) 100-100, yaitu 100% akses air minum dan 100% akses sanitasi, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

➤ Tujuan kegiatan :

- ✓ Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah dan desa.
- ✓ Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi.
- ✓ Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum.
- ✓ Hibah insentif dan,
- ✓ Dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan program.

➤ Narasumber :

Adapun Narasumber/Instruktur pada kegiatan Penguatan Kelembagaan Pamsimas se-Provinsi Riau ini adalah:

- a. Kepala Sub Direktorat Lingkungan Hidup Direktorat PSDA dan TTG Kemendes PDTT
- b. Tenaga Ahli STBM dan Sanitasi Prov. Riau
- c. ROMS 4 Program Pamsimas Provinsi Riau

➤ Peserta dan pelaksanaan

Peserta Pemasyarakatan dan Penguatan Kelembagaan Pamsimas se-Provinsi Riau Tahun 2019 berjumlah 60 orang terdiri dari DPMD Kabupaten, Kepala Desa Lokasi Pamsimas, Pengurus Asosiasi Pamsimas Kabupaten, Pengurus KP-SPAMS dan Tenaga Ahli P3MD bagian perencanaan berasal dari 10 Kabupaten Se-Provinsi Riau Seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan Pamsimas se-Provinsi Riau ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 28 s.d 30 April 2019 bertempat di Hotel Winstar Jl. Moh. Ali No. 118 Padang Terubuk Senapelan-Pekanbaru.

➤ *Realisasi dan capaian kegiatan 100 %. Dan realisasi keuangan 90,67 %*

27.) Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional

➤ Pelaksanaan kegiatan :

- ✓ Gelar TTG Nasional turut mempromosikan/memasyarakatkan inovasi akar rumput (grassroot inovation) dari penjurut tanah air dan sebagai wahana untuk menjaring ide/gagasan dalam rangka penyusunan kebijakan Pemerintah untuk pengembangan dan pemanfaatan TTG dimasa mendatang
- ✓ Gelar TTG merupakan kegiatan tahunan yang bertujuan untuk memasyarakatkan inovasi hasil teknologi tepat guna yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, TTG dapat dijadikan sebagai ajang promosi dan pertukaran informasi terkait pengembangan dan pemanfaatan TTG untuk kemajuan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di desa
- ✓ Selain itu Gelar Teknologi Tepat Guna merupakan salah satu upaya strategis dalam menyebarluaskan mengenai informasi dan pengembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjawab permasalahan rakyat serta terobosan untuk menghasilkan ilmu-ilmu muda baru yang berasal dari rakyat Indonesia sendiri. hal ini juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah untuk aspek ekonomi dan lingkungan hidup.

- ✓ Pembukaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional XXI Tahun 2019 dilaksanakan tanggal 21 s/d 25 September 2019 di Provinsi Bengkulu.
- Peserta Gelar TTG Nasional XXI:

Gelar TTG Nasional XXI diikuti oleh berbagai instansi/lembaga Pemerintah Tingkat Pusat, Provinsi dan kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi dan swasta yang diikuti oleh 34 Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia, antara lain :

 - a. Gubernur seluruh Indonesia
 - b. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi seluruh Indonesia
 - c. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia
 - d. Kepala BAPPEDA Provinsi seluruh Indonesia
 - e. Kepala Dinas PMD Provinsi seluruh Indonesia
 - f. Kepala Bidang TTG Provinsi seluruh Indonesia
 - g. Bupati /Walikota seluruh Indonesia
 - h. Ketua Tim Penggerak PKK Kab/Kota seluruh Indonesia
- Rangkaian kegiatan pada Gelar TTG Nasional XXI:
 - Gala Dinner yang dilaksanakan tanggal 21 September 2019 lokasi di Gedung Daerah/ Balai Raya Semarak Bengkulu;
 - Pembukaan Pameran Gelar TTG Nasional XXI tanggal 22 September 2019 lokasi di Sport Center Pantai Panjang Kota Bengkulu;
 - Lokakarya Dan Rakornis PPMD tanggal 23 September 2019 di Hotel Grage Bengkulu
 - Widyawisata Teknologi tanggal 24 September 2019 lokasi di Kabupaten Kepahiang dan objek wisata Kecamatan Kabawetan Desa Sidoharjo
 - Penutupan TTG Nasional ke XXI tahun 2019 tanggal 25 September 2019 lokasi di Sport Center Pantai Panjang
- *Realisasi dan capaian kegiatan **100%**. Dan realisasi keuangan **88,92%***

28.) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi Riau

➤ Pelaksanaan kegiatan :

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang dilaksanakan secara serentak diseluruh desa dan kelurahan di Indonesia, hasilnya telah mampu meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No.42 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

➤ Tujuan dan sasaran :

- ✓ Tujuan Meningkatkan Kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan mewujudkan pada Penguatan Integritas sosial melalui kegiatan – kegiatan gotong royong dalam pelaksana pembangunan
- ✓ Sasaran : Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat, Meningkatnya peran aktif masyarakat dan pembangunan, Meningkatnya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil – hasil pembangunan

➤ Uraian kegiatan :

1. Melaksanakan penilaian lomba gotong royong masyarakat tingkat Provinsi
2. Pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Provinsi
3. Pemberian kelengkapan pertukangan kepada kabupaten yang menjadi tuan rumah BBGRM yakni berupa: Gerobak dorong, cangkul, sapu lidi dan keranjang sampah.
4. Pemberian bantuan dana stimulan untuk Juara Pelaksana terbaik Gotong Royong Masyarakat I, II, III untuk tingkat Desa dan Kelurahan serta bantuan alat – alat gotong Royong pada lokasi BBGRM tingkat Provinsi Riau

➤ Waktu kegiatan/ tempat:

Peringatan BBGRM tingkat Provinsi pada tanggal 27 Nopember 2018 dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis.

Pemenang dalam rangka Penilaian BBGRM 2019:

- **Tingkat Desa :**

- | | |
|--------------|---|
| 1. Juara I | : Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis |
| 2. Juara II | : Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darusalam, Kabupaten Rokan Hulu. |
| 3. Juara III | : Desa Dwi Tunggal Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kep. Meranti. |

- **Juara Tingkat Kelurahan :**

- | | |
|--------------|---|
| 1. Juara I | : Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. |
| 2. Juara II | : Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai. |
| 3. Juara III | : Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. |

➤ *Realisasi dan capaian kegiatan 100%. Dan realisasi keuangan 81,24%*

29.) Peningkatan Kapasitas Pengurus LPM

➤ Pelaksanaan kegiatan :

Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Provinsi Riau Tahun 2019 memiliki makna yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian rencana strategik sekaligus mendukung proses pencapaian Visi dan Misi kepala Desakhususnya dalam peningkatan dan pengembangan sumber daya masyarakat Desa/Kelurahan diseluruh Kab/Kota yang ada di Provinsi Riau, hal ini selaras dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, dimana Ketua LPM adalah sebagai Sekretaris Tim Penyusunan RPJMDes dan RKPDes selain itu LPM Des dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa dengan mengoptimalkan peranannya sesuai dengan bidang tugas, pokok, hak, dan wewenang yang dimilikinya.

➤ Tujuan dan sasaran :

- ✓ Untuk menyamakan persepsi pemerintah dengan pengurus Lembaga Kemasyarakatan (LPM) Provinsi Riau

- ✓ Untuk meningkatkan peran dan fungsi LPM yang ada ditengah-tengah masyarakat, sehingga mampu menggerakkan pembangunan menuju kemandirian masyarakat.
 - ✓ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan.
 - ✓ Meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengolah dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang Agrobisnis dan Pariwisata.
 - ✓ Meningkatkan ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
- Peserta dan Waktu kegiatan/ tempat:
- ✓ Peserta yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus LPM Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 dibagi menjadi 3 wilayah:
 - ✓ Lokasi kegiatan di Indragiri Hulu dilaksanakan tanggal 01 s/d 03 April 2019 dan seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan di Wisma Five Boy's Kab. Indragiri Hulu peserta: 80 (delapan puluh) orang
 - ✓ Lokasi kegiatan di Kuansing dilaksanakan tanggal 04 s/d 06 April 2019 dan seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan di Hotel Angela Kab. Kuantan Singingi peserta: 80 (delapan puluh) orang
 - ✓ Lokasi kegiatan di Rohil dilaksanakan mulai tanggal 28 s/d 30 Maret 2019 dan seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan di Hotel Bintang Mulia Kab. Rokan Hilir peserta: 80 (delapan puluh) orang.
- Pemateri:
- Dari DPRD Provinsi Riau, PMD Provinsi Riau, PMD kabupaten, LPM Provinsi Riau, Bappeda, Akademisi.
- *Realisasi dan capaian kegiatan 100 %. Dan realisasi keuangan 78,98 %*

30.) Peningkatan Kapasitas pengurus Lembaga Adat Melayu

Capaian program ini adalah Merumuskan Dan Merekomendasikan Hasil Kesepakatan Yang Didapat Dari Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Se-Provinsi Riau Tahun 201 serta meningkatnya peran pengurus Lembaga Adat Melayu dalam memberdayakan masyarakat di Provinsi Riau, menyamakan persepsi dan mengimplementasikan visi dan misi serta untuk mengevaluasi dan

mengetahui sejauh mana pengurus Lembaga Adat dalam mengembangkan organisasinya.

- Tujuan Peningkatan Kapasitas pengurus Lembaga Adat Melayu:
 - ✓ Penguatan kelembagaan, lembaga adat melayu riaudalam upaya melestarikan adat istiadat dan nilai kearifan lokal se- provinsi riau.
 - ✓ Untuk meningkatkan koordinasi dan mempererat hubungan kekeluargaan, kebersamaan antara lembaga adat melayukab/kota se provinsi riau.
 - ✓ Agar kita bersama dapat mengidentifikasi nilai-nilai budaya yang masih hidup dan potensi untuk terus dapat di kembangkan.
 - ✓ Memfasilitasipeningkatanperan, fungsiantugaslembagaadat/tokohadatsebagaimitrapemerintahdalambi dangpemerintahan, pembangunandankemasyarakatanataunilaisosialbudaya.
 - ✓ Menggali dan menambah wawasan serta berkomunikasi dua arah dengan narasumber dalam musyawarah adat tentang bagaimana menyusun regulasi yang mendukung peran dan tugas lembaga adat daerah.
- Waktu kegiatan : tanggal 28 s/d 30 April 2019
- Tempat : Hotel Alpha di Pekanbaru
- Peserta : dari pengurus LAM Kabupaten, Kecamatan dan LAM Provinsi dengan jumlah sebanyak 100 orang
- Pemateri : kemendagri, Akademisi, LAM provinsi, Kanwil BPN
- Realisasi dan capaian kegiatan **100%**. Dan realisasi keuangan **93,80%**

31.) Peningkatan pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)

Capaian program yang diharapkan adalah jumlah kabupaten/ kota yang mendapatkan peningkatan pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat, meningkatnya pelayanan UPM di lingkup Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Riau. Berfungsinya UPM di lingkup PMD kabupaten/ kota se provinsi Riau. Terwujudnya akses pengaduan masyarakat dalam lingkup program pemberdayaan masyarakat desa provinsi Riau. Terlaksananya

kegiatan Peningkatan pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat Desa di Provinsi Riau. Berfungsinya UPM serta Meningkatnya pelayanan UPM yang diakomodir untuk akses pengaduan masyarakat dalam lingkup program pemberdayaan masyarakat desa provinsi Riau.

- Pelaksanaan kegiatan : Peningkatan pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat(UPM) di Provinsi Riau.
- Tujuan :
 - ✓ Mengembangkan sistem penanganan pengaduan masyarakat agar dapat ditindak lanjuti dengan cepat, tepat dan terkoordinasi.
 - ✓ Mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang maksimal di lingkungan PMD se Provinsi Riau.
 - ✓ Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan/kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat oleh Dinas PMD Provinsi Riau dan PMD Kabupaten/Kota dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
 - ✓ Meningkatkan eksistensi UPM dalam pengelolaan pengaduan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan publik pada pemerintah daerah.
- Realisasi dan capaian kegiatan **100%**. Dan realisasi keuangan **83,52%**

32.) Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Se- Provinsi Riau/ Pendamping Desa

Upaya peningkatan kinerja perlu didukung dengan pelibatan aparat pemerintah provinsi, konsultan provinsi terutama yang terlibat secara langsung dalam pembinaan dan asistensi dengan Pemerintah Kabupaten yang dibantu oleh Pendamping Ahli Kabupaten. Untuk itu, koordinasi antara provinsi dengan kabupaten perlu menjadi bagian dari tata pengelolaan yang baik (*good governace*). Tata pengelolaan (*Governance*) dalam pembangunan partisipatif meliputi berbagai faktor prosedur administrasi, kelembagaan dan organisasi dalam pembentukan kebijakan dan pengelolaan pembangunan desa yang bersifat mengutamakan partisipasi masyarakat.

➤ Tujuan kegiatan:

Tujuan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Administrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisa dan evaluasi reguler atas pelaksanaan Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah yang timbul selama pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Mengkoordinasikan antar Satker Provinsi dengan kabupaten dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan dana desa;
5. Pengendalian dan konsolidasi Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) di Provinsi dan Kabupaten se Provinsi Riau.

➤ Peserta:

Peserta Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di bagi dalam 4 wilayah:

- ✓ Pelaksanaan di Kabupaten Indragiri Hulu dilaksanakan di Wisma Five boys 7 s/d 10 April 2019. diikuti oleh 50 (Lima Puluh) orang peserta, yang berasal dari: Pendamping Lokal Desa (PLD) Inhu, sebanyak 36 Orang Peserta; Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) Kabupaten Indragiri Hulu, sebanyak 9 Orang Peserta; Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Kabupaten Indargiri Hulu, sebanyak 5 Orang Peserta;
- ✓ Pelaksanaan di Kuansing dilaksanakan di Hotel Angela tanggal 31 s/d 3 April 2019. diikuti oleh 50 (Lima Puluh) orang peserta, yang berasal dari: Pendamping Lokal Desa (PLD), sebanyak 36 Orang Peserta; Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), sebanyak 9 Orang Peserta; Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), sebanyak 5 Orang Peserta;
- ✓ Pelaksanaan di Rohil dilaksanakan di Hotel Bintang Mulia tanggal 25 s/d 28 Maret 2019. diikuti oleh 50 (Lima Puluh) orang peserta, yang berasal dari: Pendamping Lokal Desa (PLD) Kabupaten Rokan Hilir, sebanyak 22 Orang Peserta; Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) Kabupaten Rokan Hilir,

sebanyak 17 Orang peserta;Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Kabupaten Rokan Hilir, sebanyak 11 Orang Peserta;

- ✓ Pelaksanaan di Pekanbaru dilaksanakan di Hotel Resty tanggal 19 s/d 22 Agustus 2019 dengan peserta sebanyak 60 (Enam Puluh) orang peserta, yang berasal dari:
 - Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA PMD) 8 orang
 - Tenaga Ahli Pembangunan Ekonomi Desa (TA PED) 10 orang
 - Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TA PP) 8 orang
 - Tenaga Ahli Teknonlogi Tepat Guna (TA TTG) 10 orang
 - Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA ID) 9 orang
 - Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA PSD) 10 orang
 - Sekretariat P3MD 5 orang.

➤ *Realisasi dan capaian kegiatan 100 %. Dan realisasi keuangan 93,99 %*

VI. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

33.) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan BUMDes Se- Provinsi Riau

Kegiatan Pembinaan Pengelolaan BUM Desa merupakan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Riau dan kabupaten dalam upaya mencapai tujuan BUM Desa dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintahan desa. BUMDesa pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi.

Tujuan dari Kegiatan ini antara lain:

- ✓ Memberikan pedoman bagi desa dalam membangun BUMDesa,
- ✓ Memberikan input terhadap gerakan membangun BUMDesa kedepan,
- ✓ BUMDes menjadi salah satu institusi desa yang mewarnai desa sebagai subjek pembangunan,

- ✓ Memberikan inspirasi bagi gerakan dibawah dan diluar pemerintah dalam menggali sumber sumber pengembangan ekonomi desa dan pembangunan desa;
- ✓ Memahami pemberdayaan masyarakat dan desa, kebijakan pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat,
- ✓ Terampil mengelola manajemen BUMDesa, menyusun rencana kerja tindak lanjut, Memahami praktek pengelolaan BUMDesa,
- ✓ Memberdayakan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa,
- ✓ Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalan potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktifitas usaha mikro perdesaan,
- ✓ Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri dan tangguh untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat,
- ✓ Menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi pengangguran, dan Mendorong pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan.
- Uraian kegiatan:
 - ✓ Melakukan koordinasi ke Dinas PMD Kabupaten se Provinsi Riau.
 - ✓ Melakukan kunjungan ke lokasi Bum Desa Kabupaten se Provinsi Riau.
 - ✓ Melakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa se Provinsi Riau.
 - ✓ Melakukan Pembinaan, pemantauan, Pengawasan terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelolaan BUM Desa se Provinsi Riau.
- Waktu dan tempat : Dilaksanakan di 3 kabupaten (Rohil tanggal 24 s/d 27 Maret 2019, Inhu tanggal 3 s/d 6 April 2019, Pekanbaru tanggal 2 s/d 5 Juli 2019.
- Peserta : Peserta adalah pengurus Bumdes di 10 kabupaten

Peserta Rohil 80 orang, peserta Inhu 80 orang, peserta di pekanbaru 80 orang.

- Narasumber : Narasumber dari DPRD, akademisi UNRI, Unilak, Direktur Bumdes, OJK danpelatih daerah dari TAPM.
- *Realisasi dan capaian kegiatan 100%. Dan realisasi keuangan 84,65%*

34.) Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa se-Provinsi Riau

Penguatan kelembagaan pasar desa memiliki peran strategis dalam mengembangkan jaringan ekonomi, mendukung pengembangan produk-produk pertanian maupun hasil kegiatan industry kecil dan usaha lainnya dalam meningkatkan daya saing.

Pasar desa sebagai salah satu sumber kekayaan desa, masih kurang mendapatkan pembinaan dan dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam kebijakan pelestarian pasar desa. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pasar desa secara proporsional masih lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah desa dan kelurahan di Indonesia. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, badan/ dinas pemberdayaan masyarakat provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia mulai melaksanakan pendataan ulang jumlah pasar desa di wilayahnya. Provinsi Riau sendiri terdata jumlah pasar desa terdapat 786 unit pasar desa dari 1.617 desa yang ada di 10 kabupaten.

- Tujuan :
 - Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Kepala Desadan pengelola Pasar Desa tentang kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pasar berdasarkan Permendagri Nomor 42 tahun 2007.
 - Meningkatkan peran perangkat desa dan pengelola pasar dan BPD untuk kerjasama dengan pihak ketiga.
 - Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang administrasi dan penyusunan laporan keuangan serta teknik penyusunan Perdes pengelolaan pasar desa.
 - Mempererat hubungan koordinasi perangkat desa dengan pengelola pasar desa dan BPD se Provinsi Riau.

- Tempat dan waktu Kegiatan:
Bimbingan Teknis pengelolaan Pasar Desa se - Provinsi Riau Tahun 2018 dilaksanakan di Hotel Furaya Jl. Sudirman Pekanbaru pada tanggal 29 s.d 31 Juli 2019.
- Peserta dan Narasumber:
Peserta berjumlah 60 orang. Terdiri dari kepala desa dan pengelola pasar, BPD dan Dinas PMD kabupaten/ kota. Narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis pengelolaan Pasar Desa se- Provinsi Riau Tahun 2019, terdiri dari :
 1. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
 2. PC.ROMS4 Pamsimas
 3. Dinas Perindustrian Provinsi Riau
 4. Bulog wilayah Riau
 5. Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian Universitas Riau
- *Realisasi dan capaian kegiatan 100%. Dan realisasi keuangan 87,31%*

VII. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

35.) Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa se Provinsi Riau

Peningkatan aparatur desa menjadi kata kunci dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang paham akan tugas pokok dan fungsinya. Salah satu strategi penguatan Sumber Daya Manusia dalam hal ini aparatur desa yaitu melalui peningkatan kapasitas atau pelatihan. Pelatihan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi pelaku dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yaitu aparatur desa, tentunya keberhasilan pelatihan ditentukan oleh 2 (dua) faktor diantaranya pengelolaan proses pembelajaran (pendekatan, metode, dan media fasilitasi/pembelajaran) dan pengelolaan kegiatan (manajemen) dalam penyelenggaraan pelatihan. skema peningkatan kapasitas aparatur desa, dilanjutkan dengan materi kompetensi yaitu implementasi tugas dan fungsi dengan sasaran sekretaris desa dan pejabat atau staf pada dinas PMD kabupaten yang membidangi

- Tujuan pelatihan:

- ✓ Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menuju Clen and Good Governance;
- ✓ Mewujudkan Pelayanan Public Service yang Transparan, akuntabel dan berorientasi kepada masyarakat;
- ✓ Menciptakan Aparatur Desa yang handal, terpecaya dan professional.
- ✓ Memberikan pedoman bagi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

➤ Tempat dan waktu Kegiatan:

Kegiatan dilaksanakan di Hotel Furaya tanggal 6s.d 9 Agustus 2019

➤ Peserta dan instruktur:

Peserta berjumlah 50 orang. Terdiri dari Sekretaris desa dan unsure pejabat/ staf dinas PMD kabupaten yang membidangi.

instruktur dalam kegiatan ini, terdiri dari :Kemendagri, instruktur PMD provinsi dan PMD kabupaten.

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa terhadap seluruh Desa di Provinsi Riau merupakan upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang professional melalui pemberian arahan dan pedoman kebijakan Pemerintah Provinsi serta dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi.

➤ *Realisasi dan capaian kegiatan 100 %. Dan realisasi keuangan 87,15%*

36.) Penyusunan Data Profil Desa/Kelurahan

Profil Desa dan Kelurahan yang singkat dengan nama PRODESKEKEL. Program ini menyediakan informasi mengenai potensi dan tingkat perkembangan di desa dan kelurahan serta berisikan data dasar keluarga, jumlah penduduk dalam sebuah desa dan kelurahan, sumber daya yang ada, mengidentifikasi potensi dan perkembangan suatu wilayah desa dan kelurahan sampai dengan kendala yang dihadapi desa serta kelurahan dalam perkembangan potesi mereka. Pelayanan PRODESKEKEL bertujuan sebagai sumber informasi dan data dasar dalam perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan. Pada bagian data dasar keluarga berisikan tentang biodata masing-masing penduduk sesuai dengan kartu keluarga yang dimiliki. Perbedaan dari SIAK dan PRODESKEKEL adalah sistem informasi terfokus pada data kependudukan dan kekepengurusan administrasi sipil

sedangkan sistem informasi PRODESKEL berisi tentang data kependudukan serta identifikasi potensi dan perkembangan suatu wilayah didesa dan kelurahan.

➤ Tujuan Kegiatan:

- ✓ Tersosialisasinya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Pendataan Profil Desa dan Kelurahan;
- ✓ Menyamakan persepsi dan pemahaman antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah tentang pengelolaan urusan pemerintah dalam sub bidang pemanfaatan data profil desa dan kelurahan serta evaluasi tingkat perkembangan masyarakat melalui Perlombaan Desa dan Kelurahan.
- ✓ Meningkatkan kemampuan, kemauan dan keterampilan peserta untuk mengetahui jenis dan ruang lingkup data profil desa dan kelurahan serta berbagai proses data dan tata cara pengumpulan, pengolahan, analisis, publikasi dan pendayagunaan data profil Desa dan Kelurahan.
- ✓ Menjamin ketersediaan data dalam Penyusunan (Pendataan Dan Pengimputan) dan Validasi dan Pendayagunaan data Kelurahan ditingkat Desa dan Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi.
- ✓ Mengetahui klasifikasi desa, kategori dan tipologi desa se-Provinsi Riau.

➤ Peserta Kegiatan dan tempat acara:

Peserta Kegiatan Pelatihan Penyusunan Data Profil Desa Dan Kelurahan berjumlah 36 orang yaitu mewakili Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau yaitu 1 (satu) orang Pejabat PMD/sebutan lain Kab/Kota dan 2 Desa/Kel masing-masing 1 orang, Seluruh rangkaian pelaksanaan Pelatihan Penyusunan Data Profil Desa dan Kelurahan Provinsi Riau dilaksanakan di FURAYA Hotel Pekanbaru ruangan Gaharu dengan waktu pelaksanaan kegiatan selama 3 (Tiga) hari pada Tanggal 22 sd 24 Juli 2019.

➤ *Realisasi dan capaian kegiatan 100 %. Dan realisasi keuangan 76,93 %*

37.) **Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa**

Penguatan kedudukan BPD dalam Undang-undang Desa sangat jelas dan tegas, mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dalam Ketentuan Umum pasal 1 angka (4) menyebutkan bahwa “BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Kelembagaan BPD sendiri, masih banyak permasalahan yang dihadapi, diantaranya: 1. masih minimnya SDM anggota BPD dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, 2. masih minimnya sarana dan prasarana BPD dalam pelaksanaan kinerja, 3. masih minimnya pembinaan dan pengawasan kepada BPD oleh pemerintah daerah, dan 4. sering terjadi diskomunikasi antara Pemerintah Desa dan BPD dalam melaksanakan peran masing-masing di desa.

Permasalahan-permasalahan tersebut, perlu segera diatasi melalui kebijakan maupun program/kegiatan yang tepat. Berdasarkan pasal 67 Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD, menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur, meliputi: 1. memfasilitasi dukungan kebijakan; 2. fasilitasi dan konsultasi rancangan Peraturan Daerah; 3. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervise pelaksanaan kebijakan; 4. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; 5. melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas BPD; 6. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD. Selanjutnya pokok-pokok pembinaan dan pengawasan tersebut diperkuat melalui Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Seluruh Indonesia Nomor. 410/2868/SJ perihal Tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD tanggal 19 Juni 2017, menyebutkan bahwa perlunya optimalisasi peran BPD, salah satunya melalui peningkatan kapasitas.

➤ Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Meningkatkan kapasitas anggota BPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai lembaga desa yang menjalankan fungsi pemerintahan;
- Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang harmonis dan terintegrasi antara Pemerintah desa dan BPD;
- Memberikan informasi-informasi penting dan regulasi yang berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kepada anggota BPD.

Peserta pelatihan adalah Pengurus/anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Provinsi Riau dan pejabat/ staf dinas PMD kabupaten.

- ✓ Angkatan pertama: dilaksanakan di Hotel Furaya 24 s/d 27 Maret 2019 dengan peserta sebanyak 160 orang (Kuansing 96 orangt + Inhu 64 orang)
- ✓ Angkatan kedua: dilaksanakan di Hotel Furaya 28 s/d 31 Maret 2019 dengan peserta sebanyak Rohil 96 orang.

- ✓ Angkatan ketiga: dilaksanakan di Hotel Furaya 22 s/d 25 April 2019 dengan peserta sebanyak 70 orang (Kampar 10 orang + Rohul 10 Orang + Siak 10 orang + Meranti 10 orang + BAngkalis 10 orang + Inhil 10 orang + Pelalawan 10 orang).

Dalam pelaksanaan kegiatan para peserta diberikan Materi yang disampaikan untuk mencapai tujuan dimaksud, narasumber dan materi baik pada angkatan I maupun angkatan II dan III adalah sama, antara lain :Narasumber Kemendagri , Fitra, praktisi, Pusat, DPRD Provinsi Riau dan Akademisi

Setelah materi dari narasumber pusat dan daerah dilanjutkan dengan materi pelatihan yang dibagi dalam 2 kelas (kelas A dan Kelas B) setiap kelas.

➤ *Realisasi dan capaian kegiatan 100%. Dan realisasi keuangan 94,65%*

38.) Bimbingan teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) bagi aparatur desa se provinsi Riau

Capaian Program	: Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan aparatur desa agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna
Keluaran	: Terlaksananya Bimbingan teknis perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa se provinsi Riau
Hasil	: Meningkatnya kapasitas perangkat desa dalam memahami tugas dan fungsi terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan pem,bangunan di desa.
Target Kinerja	: 6 Kabupaten di provinsi Riau
Realisasi Kinerja	: Terlaksananya kegiatan Bimbingan teknis penyusunan RPJMDes dan RKPDDes bagi aparatur desa se provinsi Riau sehingga meningkatkan profesionalisme perangkat

	desa se provinsi Riau
peserta	: Kabupaten pelalawan 15 orang, kabupaten Kampar 15 orang, kabupaten Siak 20 orang, kabupaten kuantan singing 50 orang, kabupaten Indragiri Hulu 50 orang, dan Kabupaten Rokan Hilir 90 orang. Total peserta sebanyak 240 orang
Tempat dan kegiatan	: Gelombang 1 Kegiatan dilaksanakan di hotel Grand Rohil . tanggal 28 s/d 31 Maret 2019. Gelombang 2 dilaksanakan di wisma Hasanah Kuansing tanggal 4 s/d 7 April 2019. Gelombang 3 dilaksanakan di Wisma Five boys Inhu. Tanggal 10 s/d 13 April 2019. Dan gelombang 4 dilaksnakan di Hotel Resty Pekanbaru tanggal 28 s/d 1 Mei 2019.
Pemateri dan instruktur	Pemateri dari kementerian DPRD Prov Riau, PMD Provinsi, PMD kabupaten dan pelatih/ instruktur dari TAPM.

➤ *Realisasi dan capaian kegiatan 100%. Dan realisasi keuangan 99,11%*

39.) Pembinaan Terhadap Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penataan Wilayah Desa

Pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan ini merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintah baik dalam rangka pelayanan pemberdayaan dan pembangunan demi terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Dengan kata lain, hakekat pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa sebagai turunan hukum dari PP 47 Tahun 2015 dinyatakan bahwa ruang lingkup Penataan Desa terdiri dari :

- Penghapusan Desa dan Desa Adat
- Pembentukan Desa dan Desa Adat
- Perubahan Status Desa dan Desa Adat

Tujuan Dilaksanakannya kegiatan ini Adalah :

- ✓ Melaksanakan fasilitasi penataan wilayah desa di Provinsi Riau;
- ✓ Melaksanakan peran Gubernur dalam melakukan evaluasi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten dan Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa/Kelurahan;
- ✓ Memfasilitasi permasalahan Penataan Desa/Kelurahan di Provinsi Riau

➤ *Rangkaian kegiatan:*

Identifikasi, Evaluasi, Klarifikasi dan Koordinasi lapangan dalam rangka penataan wilayah desa pada 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Riau:

Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Rokan Hulu. Dari tanggal 18 s.d 29 Nopember 2019. Setiap pertemuan akan menghasilkan kesepakatan Tim antara lain :

- Diperolehnya solusi atau langkah bersama Tim Evaluasi Penataan Desa terkait peningkatan status 14 kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir.
- Pembahasan bersama terkait rekomendasi Gubernur Riau untuk pemekaran 3 (tiga) kelurahan di Kota Dumai.
- Rapat penyusunan jadwal Evaluasi, Klarifikasi, dan Koordinasi Lapangan dalam rangka penataan wilayah desa di Provinsi Riau pada 5 Kabupaten

➤ *Realisasi dan capaian kegiatan 100 %. Dan realisasi keuangan 90,07 %*

40.) Rapat Kerja urusan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan

Dalam memfasilitasi kebijakan dan permasalahan yang menjadi tuntutan masyarakat di perdesaan, pada Rapat Kerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Provinsi Riau Tahun 2019, Isu Aktual (terkini) yang menjadi pembahasan, antara lain:

- a. Fasilitasi penataan wilayah desa dan kelurahan dan Penataan Desa Adat pada kabupaten/Kota di Provinsi Riau pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat, tanggal 4 Juli 2019;
- b. Persiapan Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa;
- c. Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Kabupaten di Provinsi Riau dalam rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Inklusif menuju Desa Mandiri;
- d. Fasilitasi dampak lingkungan pasca kebakaran hutan dan lahan serta kebencanaan lainnya, Pengentasan Stunting dan Komitmen Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa melalui kewenangan desa.

Pada saat rapat kerja dalam upaya pencapaian Misi “Pembangunan Ekonomi Inklusif” dan kebijakan Provinsi Riau melalui Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa, dilakukan *Pencanangan dan Penandatanganan Komitmen bersama Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Kabupaten di Provinsi Riau dalam rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Inklusif menuju Desa Mandiri*

Tujuan Dilaksanakannya Rapat Kerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Tahun 2019 Adalah :

- ✓ Membangun komitmen dan Sinergi dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan desa di daerah;
- ✓ Memfasilitasi pemerintah kabupaten dan pemerintah desa agar melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- ✓ Mendorong pelaksanaan kewenangan urusan penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan di daerah;
- ✓ Meningkatkan keterpaduan dan kesinampungan program dan kegiatan pada pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJM Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Peserta Rapat Kerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Ini Berjumlah 156perwakilan kades dari 146 kecamatan di Riau dan 10 Pejabat Dinas PMD kabupaten.

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Kampar: 22Orang | 6. Rokan Hilir: 16Orang |
| 2. Indragiri Hulu: 15Orang | 7. Siak: 15Orang |
| 3. Bengkalis: 12Orang | 8. Kuantan Singingi: 16Orang |
| 4. Indragiri Hilir: 20Orang | 9. Kepulauan Meranti: 10Orang |
| 5. Pelalawan : 13 Orang | 10.Rokan Hulu: 17 Orang |

Pelatihan Ini Dilaksanakan dari Tanggal 21 S/D 23 Oktober 2019, Bertempat Di Hotel FurayaPekanbaru.

Narasumber Rapat Kerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Tahun 2019 Berasal Dari:

- Wakil Gubernur Riau (pembukaan)
- Ditjen Bina Pemdes Kemendagri RI.
- Direktur Penataan dan administrasi Desa,
- Akademisi UNRI.
- Ketua TKPKP Provinsi Riau.
- DPRD Provinsi Riau.

➤ *Realisasi dan capaian kegiatan 100%. Dan realisasi keuangan 97,82%*

41.) Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Provinsi Riau

Pengelolaan keuangan desa terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan. Tahapan-tahapan kegiatan tersebut harus dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku agar tujuan pembangunan desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat terlaksana. Agar pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana secara efisien, tertib, transparan dan akuntabel diperlukan pengetahuan, keterampilan

dan konsistensi dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama bagi kepala desa dan perangkat desa sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa.

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Provinsi Riau Tahun 2019 mempunyai tujuan sebagai berikut :

- ✓ Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan aparatur Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan desa.
- ✓ Meningkatkan kapasitas kinerja penyelenggaraan pemerintah desa kearah yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
- ✓ Bimtek pengelolaan keuangan desa ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi aparatur desa dalam memahami tugas-tugasnya.

Narasumber dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Provinsi Riau Tahun 2019, terdiri dari :

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Bina Pemerintahan Desa
- BPKP Perwakilan Riau
- KPPN Pekanbaru

Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Provinsi Riau Tahun 2019 berasal dari 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kepulauan Siak, Bengkalis, Kuansing, Rokan Hilir yang keseluruhannya berjumlah 100 orang, yang terdiri dari aparatur desa yang membidangi keuangan desa.

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Provinsi Riau Tahun 2019 dilaksanakan di Hotel Alpha Pekanbaru pada tanggal 29 s.d 31 Juli 2019.

- *Realisasi dan capaian kegiatan 100%. Dan realisasi keuangan 90,34%*

42.) Bimbingan Teknis Manajemen Aset Desa

Kegiatan Bimbingan Manajemen Aset Desa Tahun 2019 adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan aset desa. Dengan dilaksanakannya Bimbingan teknis manajemen aset
Desa bagi Aparatur Pemerintah Desa di Provinsi Riau diharapkan Aparatur Pemerintah Desa mengetahui dan memahami regulasi pengelolaan

asset Desasehinggadalammelaksanakanpengelolaan asset
Desamengacukepadaperaturanperundang-undangan yang berlaku.

Tujuan Bimtek adalah :

1. Menyamakan persepsi tentang manajemen dan pengelolaan aset desa sesuai dengan Permendagri Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
2. Meningkatkan kapasitas pengelola aset desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Meningkatkan keterampilan pengelola aset desa dalam pengadministrasian aset desa.
4. Mendorong optimalisasi aset desa untuk meningkatkan sumber daya dan kemandirian desa.

Narasumber dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Provinsi Riau Tahun 2019, terdiri dari :

- Direkotrat Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri
- Kanwil Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
- Direktorat Jendral Pajak
- Badan Pertanahan Nasional
- BPKP

Peserta Kegiatan Bimbingan Manajemen Aset Desa Tahun 2019 berasal dari 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Inhil, Inhu, Kampar yang keseluruhannya berjumlah 90 orang, yang terdiri dari aparatur desa yang membidangi aset desa.

Kegiatan Bimbingan Manajemen Aset Desa Tahun 2019 dilaksanakan di Hotel Ayola First Pekanbaru pada tanggal 10 s.d 12 Juli 2019.

- *Realisasi dan capaian kegiatan 100%. Dan realisasi keuangan 91,49%*

43.) Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Lokasi Kegiatan Se Provinsi Riau

Kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan keuangan dan aset di desa berrjalan, apakah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan aset desa. Kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa Provinsi Riau dilaksanakan di 10 (sepuluh) kabupaten yang ada di Provinsi Riau.

Tujuan Monitoring adalah :

- ✓ Untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan keuangan dan aset desa di Provinsi Riau;
- ✓ Untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan dan aset desa di Provinsi Riau sudah mengacu kepada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan aset Desa;
- ✓ Untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- ✓ Membuat rekomendasi pemecahan masalah dalam pengelolaan keuangan dan aset desa agar dapat terlaksana dengan baik, transparan dan akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

➤ *Realisasi dan capaian kegiatan 100%. Dan realisasi keuangan 86,58 %*

44.) Peningkatan Kapasitas Pendamping Profesional Desa Se- Provinsi Riau

Peningkatan kapasitas pendamping desa menjadi salah satu aspek penting yang dapat membantu pencapaian tujuan dan target pelaksanaan UU Desa secara optimal. Kapasitas pendamping desa yang dimaksud mencakup :

- 1) Pengetahuan tentang kebijakan UU Desa;
- 2) Keterampilan memfasilitasi pemerintah desa dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik;
- 3) Keterampilan tugas-tugas teknis pemberdayaan masyarakat; dan
- 4) Sikap kerja yang sesuai dengan standar Kompetensi pendamping dan tuntutan UU Desa.

➤ Tujuan kegiatan antara lain:

- ✓ Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan Pendamping Profesional Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pendampingan desa.
- ✓ Meningkatkan kapasitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa ke arah yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
- ✓ Diharapkan mampu menjadi pedoman bagi Pendamping Profesional Desa dalam memahami tugas-tugasnya.

➤ Peserta dan waktu pelaksanaan:

Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pendamping Profesional Desa Se-Provinsi Riau Tahun 2019 berasal dari 10 (sepuluh) kabupaten se-Provinsi Riau yang berjumlah 147 orang, yang terdiri dari TA-PED.

(Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Desa) dan PDP (Pendamping Desa Pemberdayaan). Rangkaian kegiatan dilaksanakan di Hotel Dafam tanggal 29 April s/d 1 Mei 2019.

➤ *Realisasi dan capaian kegiatan 100%. Dan realisasi keuangan 95,57 %*

- Secara keseluruhan realisasi kegiatan fisik APBD 2019 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Riau sampai akhir tahun anggaran 31 Desember 2019 sebesar **100 Persen** dan penyerapan anggaran keuangan **88,46 persen, atau sebesar Rp. 24.636.981.393. dari total anggaran BL dan BTL sebesar Rp. 27.851.901.809.**
- Realisasi BL sebesar 11.915.725.999,87 atau sebesar 90.05% dari anggaran BL sebesar Rp. 13.231.800.000
- Realisasi BTL sebesar 12.721.255.394 atau sebesar 89.% dari anggaran BTL sebesar Rp. 14.620.101.809

BAB IV
REALISASI PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PMD

4.1 Realisasi dan Kendala Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD

1. Realisasi

Pada DPA -SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019, **terdapat 7 Program** yang didalamnya mencakup **44 kegiatan** dengan jumlah dana sebesar **Rp. 27.851.901.809** yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.620.101.809,-
- Belanja Langsung sebesar Rp.13.231.800.000

Berdasarkan laporan Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Langsung APBD Provinsi Riau pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2019, Belanja Tidak Langsung dan Belanja langsung per 31 Desember 2019, dimana :

- Realisasi Fisik 100%
- Realisasi Keuangan 88,46% atau sebesar Rp.24.636.981.393.

2. Kendala

Capaian kinerja Realisasi Fisik dan Keuangan tahun 2019 pada Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau tidak ada kendala yang berarti. Program dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana dan jadwal yang telah disusun dan ditetapkan.

BAB V

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

5.1 PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, adalah permasalahan pokok yang berakitan dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain:

- 1) Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan dalam menggerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan
- 1) Belum optimal Peran BUMDes dalam menkonsolidasikan dan menggerakkan perekonomian desa dan masyarakat desa.
- 2) Belum optimalnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa

5.2 SOLUSI

Dalam Rangka pencapaian permasalahan di atas, ada beberapa solusi yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa dimasa yang akan datang demi pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijakan lainnya. Diantaranya:

- 1) Mendorong peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga yang ada di desa dalam pembangunan desa yang berkelanjutan melalui bantuan keuangan khusus dan peningkatan kapasitas lembaga desa.
- 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan penguatan Permodalan BUMDes
- 3) Melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyaralatan di desa;

BAB VI

PENUTUP

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin menegaskan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau dalam upaya peningkatan kapasitas desa dan kelurahan. Pemerintah Provinsi diamanahkan melakukan pembinaan dan pengawasan diantaranya :Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/ Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang mengatur Desa, Pemerintahan Desa, pemberian Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan, pendampingan, dan bantuan teknis, peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/ Kota dan lembaga kerja sama antar desa, serta membantu pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau telah berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan seoptimal mungkin.

Mudah-mudahan pada tahun berikutnya permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dapat teratasi dan kegiatan dijalankan dengan maksimal.

Demikian laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 ini disampaikan, kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Februari 2019

**Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU**



Hj. RAJA SITI NURAI SYAH, S.Sos. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19671028 1995032001